

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.

Berdasarkan laporan Kementerian Negara Koperasidan Usaha Kecil Menengah (KUKM) mendata, hinggabulan Mei 2012 total koperasi di Indonesia berjumlah 192.443 unit. Pertumbuhannya 6,72% per tahun, yaitu 170.411 unit (2009), 177.482 unit (2010) dan 188.181 unit (2011). Di antaranya sekitar 26-27 persen tidak aktif atau istirahat, Sekretaris Kementerian Negara KUKM, Agus Muharram menyatakannya ketika rapat kerja (raker) Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Kementerian Negara KUMK di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9). Jumlahkoperasi yang terbanyak di JawaTimur (29.150 unit), Jawa Tengah (26.604 unit), Jawa Barat (23.848 unit).Berikutnya Sumatera Utara (10.879 unit), Sulawesi Selatan (8.044 unit), DKI Jakarta (7.663 unit), Nanggore Aceh Darussalam (7.079 unit), Banten (6.056 unit), Sulawesi Utara (5.766 unit) dan Kalimantan Timur(5.338

unit).Agusmenyambung, Jumlahnyatersebar di seluruhprovinsi.Berdasarkanjenisnya jumlahkoperasikonsumen yang terbesar (75,68%). Berikutnya, koperasiprodusen (17,98%), simpanpinjam (4,53%), pemasaran (1,24%), danjasa (0,56%). Jumlahanggotanya pun bertambahdari 29.240.271 orang (2009), 30.461.121 orang (2010), 30.849.913 orang (2011) ke 33.687.417 orang (2012).Sedangkantenagakerjanya dari 357.330 orang (2009), 358.768 orang (2010), 377.238 orang (2011) ke 425.822 orang (2012). Pekerja di koperasitusepertimanajerdanpegawai.Sebagiananggotakoperasiterserapmenjadite nagakerja. (<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/09/04/koperasi-di-indonesia-berjumlah-192443-unit-484232.html>)

Tidak hanya itu, kinerja koperasi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari data perkembangan koperasi khususnya untuk provinsi Jawa timur pada tahun 2011-2012 yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM.

Tabel 1.1

Data koperasi di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2012

No	Propinsi	Koperasi (unit)			Anggota (orang)	RAT
		Jml	Aktif	TidakAktif		
Tahun 2011						
1	Jawatimur	29.150	25.154	3.996	7.112.626	14.165
Tahun 2012						
1	Jawatimur	28.774	25.052	3.722	5.948.109	11.604

Sumber : <http://www.depkop.go.id> (diolah)

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat akan meningkat pula. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan koperasi sendiri, yang di jelaskan dalam Sitio (2001:18) tujuan koperasi di dalam Undang- Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang menyebabkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. Sebagai pengganti PSAK No. 27 kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Koperasi dianjurkan untuk menerapkan SAK ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas daripada SAK UMUM sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam menyusun laporan keuangannya dan pemakai laporan keuangan (anggota) dapat mengetahui manfaat yang diperoleh selama satu periode dengan Sisa Hasil

Usaha yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki serta dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Harahap (2000:49) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah output dari hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi bagi para pemakai laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas *accountability*. Mereka yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah penting untuk mengetahui kondisi laporan keuangan tersebut.

Sejak disahkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009, Indonesia memiliki tiga pilar standar akuntansi yakni SAK ETAP, Standar Akuntansi Syariah dan Standar Akuntansi Umum yang sedang dalam proses konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

SAK ETAP berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih awal diperkenankan selama memenuhi entitas tanpa akuntabilitas publik. Definisi akan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sendiri adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Hal ini menyebabkan koperasi tidak perlu lagi membuat laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) UMUM, tetapi harus mematuhi ketentuan sesuai yang ada dalam SAK ETAP. Secara garis besar ketentuan yang ada dalam SAK ETAP lebih sederhana daripada

PSAK UMUM. Hal ini memberikan kemudahan untuk koperasi dalam menyusun laporan keuangannya.

SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan agar diimplementasikan kepada seluruh entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada dasarnya entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP (Erlinasari, 2012).

Indrawati (2012) meneliti tentang implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyusunan pelaporan keuangan Koperasi SAE Pujon, Malang. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Indrawati menyimpulkan bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP berhasil dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dan hasil dari analisis laporan keuangan yaitu ada sedikit perbedaan antara laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Penelitian dengan topik sama juga dilakukan oleh Erlinasari (2012) meneliti tentang analisis penerapan SAK ETAP pada PT. BPR Surya Abadi Bersaudara. Dengan mengidentifikasi penyajian laporan keuangan yang meliputi

pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan, Linda menyimpulkan bahwa PT. BPR Surya Abadi Bersaudara hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. Dalam SAK ETAP (2009) mengungkapkan bahwa laporan keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. BPR Surya Abadi Bersaudara dalam menyusun laporan keuangan belum bisa menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk semua pos-pos dalam laporan keuangan, diantaranya untuk pos pendapatan dan pajak penghasilan (PPH).

KSP Artha Jaya merupakan koperasi simpan pinjam yang berkembang pesat di Kota Pasuruan. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak cabang yang dimiliki KSP Artha Jaya yang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Bali dan Madura. Jumlah cabang KSP Artha Jaya yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 78 cabang. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri cabang Artha Jaya berjumlah 35 cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur. Dengan banyaknya cabang dari koperasi ini membuktikan bahwasannya koperasi Artha Jaya merupakan koperasi yang mampu memberikan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat terkait kinerja yang sehat didalamnya.

Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Koperasi Artha Jaya harus mampu meyakinkan bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam ini mampu membantu kesulitan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana yang

pelayanannya tidak terjangkau oleh bank, hal ini terkait dengan visi dan misi KSP Artha Jaya.

Sebagai salah satu lembaga usaha yang membutuhkan informasi, maka KSP Artha Jaya perlu membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, dengan laporan keuangan tersebut koperasi dapat mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dan dapat mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh koperasi sehingga dengan laporan keuangan tersebut, koperasi dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi keuangan konkret bukan hanya asumsi semata.

Pentingnya koperasi Artha Jaya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya karena dengan laporan keuangan yang berdasarkan standar, KSP Artha Jaya dapat menyajikan informasi yang relevan dan andal serta apabila koperasi ingin mengajukan kredit kepada bank, SAK ETAP adalah salah satu syaratnya karena bank mensyaratkan laporan keuangan harus sesuai standar yang dikeluarkan oleh IAI (dalam hal ini SAK ETAP).

Selain itu, peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini di karenakan belum ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait perbandingan antara penilaian kinerja sesudah dan sebelum penerapan SAK ETAP. Penelitian terdahulu mayoritas terfokushanya menganalisis kinerja penerapan SAK ETAP.

Penelitian ini menganalisis kinerja koperasisebelum dan sesudah menerapkan SAK ETAP. Pemilihan Koperasi sebagai objek karena menurut Harahap (2005) dan Purba (2007), koperasi belum bisa menyajikan informasi dalam laporan keuangannya secara sistematis. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan telah mengadopsi *International Financial Reporting*

Standart (IFRS) yang dirasa terlalu kompleks untuk laporan keuangan koperasi yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Maka dari itu, penerapan SAK ETAP perlu dikaji lebih dalam lagi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan Koperasi di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, peneliti berminat untuk meneliti analisis penerapan SAK ETAP pada KSP Artha Jaya dengan judul “*Analisis Kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK ETAP*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah penerapan SAK ETAP terhadap kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan ?
2. Apa kendala yang dihadapi KSP Artha Jaya dalam penerapan SAK ETAP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membandingkan dampak penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan terhadap kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi KSP Artha Jaya Pasuruan dalam penerapan SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Perkembangan Kajian Akuntansi

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang penerapan dan pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

2. Dunia Praktik

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi KSP Artha Jaya Pasuruan dalam menerapkan praktek pengelolaan keuangan sesuai dengan SAK ETAP sehingga bisa melakukan perbaikan dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan keputusan tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

